

## Peran Perempuan dalam Politik : Eksistensi Calon Legislatif Perempuan di Kabupaten Bone

Ahmad Rosandi Sakir<sup>1</sup>, Juwita Pratiwi Lukman<sup>2</sup>, Arni<sup>3</sup>

Universitas Pattimura<sup>1</sup>, Universitas Udayana<sup>2</sup>, Politeknik Negeri Ujung Pandang<sup>3</sup>

Email: [ahmadrosandi8@gmail.com](mailto:ahmadrosandi8@gmail.com)



### INFO ARTIKEL

### ABSTRAK

#### *Research Article*

**Kata Kunci:**  
**Eksistensi**  
**Perempuan**  
**Politik**

#### *Article History*

Dikirim : 27 Januari 2024

Diterima: 17 Februari 2024

Dipublikasi: 27 Februari 2024

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali lebih dalam mengenai eksistensi perempuan dalam politik, khususnya dalam konteks pemilihan legislatif 2024 di Kabupaten Bone. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat terkait keterlibatan perempuan dalam kontestasi pemilihan legislatif Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menyelidiki peran perempuan dalam politik, khususnya terfokus pada eksistensi calon legislatif perempuan di Kabupaten Bone. Informan penelitian melibatkan calon legislatif perempuan yang berpartisipasi dalam pemilihan legislatif 2024 dan juga masyarakat di Kabupaten Bone. Hasil dari penelitian ini adalah eksistensi perempuan terbukti mampu memperkaya dimensi keberagaman dalam pengambilan keputusan publik, menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan representatif. Selain itu Penelitian juga menyoroti pemenuhan kuota 30% perempuan dalam DPR Kabupaten Bone sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik lokal. Persepsi masyarakat mencerminkan beragam pandangan terhadap peran perempuan dalam politik. Dari kebutuhan khusus perempuan hingga urgensi keterwakilan yang adil.

### Pendahuluan

Partisipasi dalam kegiatan politik adalah hak yang melekat pada setiap warga negara, mendefinisikan esensi demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Hak ini tidak hanya memungkinkan warga untuk menyuarakan pendapat mereka, tetapi juga memberi mereka akses untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka (Lapalu & Elizabeth, 2021). Melalui kegiatan politik, individu dapat mempengaruhi arah dan kebijakan negara, membentuk masyarakat yang adil dan berkeadilan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menghargai dan memanfaatkan hak ini dengan bertanggung jawab, menggalang dukungan, dan menyampaikan aspirasi mereka untuk menciptakan lingkungan politik yang mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yang beragam (Artina, 2016).

Politik pada dasarnya merujuk pada dominasi kekuasaan dan proses pengambilan keputusan yang mencakup berbagai lapisan masyarakat, mulai dari struktur keluarga hingga lembaga-lembaga politik formal paling tinggi (Amaliah & Sakir, 2023). Dengan konsepsi ini, politik mencakup aspek-aspek yang terkait dengan negara, penguasaan kekuasaan, proses pengambilan keputusan, pembentukan kebijakan, dan penentuan alokasi sumber daya. Secara umum, pemahaman tentang politik juga mencakup isu-isu mendasar dalam kehidupan sehari-hari yang secara konsisten melibatkan partisipasi kaum perempuan (Bukido, n.d.).

Peran politik perempuan adalah komponen integral dalam dinamika masyarakat yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, kebijakan publik, penyelenggaraan negara, dan politik perwalikan. Partisipasi perempuan dalam arena politik bukan hanya sekadar aspirasi kesetaraan gender, tetapi juga merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan representatif. Dalam konteks pengambilan keputusan atau kebijakan publik, keterlibatan perempuan membawa nuansa dan perspektif yang berbeda. Mereka membawa pengalaman unik mereka sebagai bagian dari masyarakat yang dapat melengkapi pandangan dan kebutuhan yang mungkin terabaikan dalam pembuatan kebijakan. Dengan demikian, kehadiran perempuan dalam proses ini dapat memastikan representasi yang lebih baik dari seluruh spektrum kepentingan masyarakat (Mayrudin et al., 2022).

Selain itu, peran politik perempuan sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Mereka tidak hanya berkontribusi pada perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, tetapi juga dalam pemeliharaan tatanan sosial. Keterlibatan perempuan dalam berbagai lembaga negara, termasuk legislatif dan eksekutif, dapat membentuk kebijakan yang lebih holistik dan memperhitungkan keberagaman masyarakat (Asriati et al., 2022). Politik perwalikan juga menjadi arena penting di mana perempuan dapat memberikan dampak positif. Mereka dapat berperan sebagai agen perubahan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, memerangi diskriminasi gender, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu tersebut. Dengan menjadi bagian dari proses perwalikan, perempuan dapat membentuk norma-norma sosial dan politik yang lebih inklusif (Ronsumbre et al., 2020).

Pemilihan legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bone, yang bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, menjadi panggung penting bagi sejumlah calon legislatif yang ambil bagian dalam kontestasi demokrasi. Sebagian dari mereka adalah *incumbent*, tokoh-tokoh yang sebelumnya telah menjabat dalam periode sebelumnya. Kehadiran calon-calon *incumbent* ini mencerminkan adanya kontinuitas dan pengakuan terhadap kontribusi mereka dalam pelayanan publik. Keberadaan calon perempuan, terutama *incumbent*, menunjukkan bahwa mereka memiliki komitmen yang kuat terhadap pengabdian mereka dalam mewujudkan perubahan positif di masyarakat. Keterlibatan perempuan dalam politik juga menjadi cermin dari semakin terbukanya pintu partisipasi politik bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan (Puspitasari & Adnan, 2020).

Kehadiran beberapa calon legislatif perempuan di Kabupaten Bone pada pemilihan legislatif 2024 menandai langkah positif dalam peningkatan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone ke depan. Partisipasi aktif perempuan dalam kontestasi politik membawa dampak signifikan terhadap dinamika kebijakan dan pengambilan keputusan. Dengan melibatkan lebih banyak perempuan dalam arena politik, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone dapat mencerminkan keragaman masyarakat dan memberikan representasi yang lebih adil. Ini bukan hanya tentang memberi suara kepada perempuan, melainkan memberikan mereka panggung untuk berkontribusi secara substantif dalam proses legislasi dan membentuk kebijakan yang mencakup kepentingan seluruh komunitas (Ummaya et al., 2022).

Keberadaan beberapa calon legislatif perempuan di Kabupaten Bone pada pemilihan legislatif 2024 bukan hanya menciptakan peluang keterwakilan yang lebih adil, tetapi juga menjadi harapan masyarakat, terutama bagi ibu-ibu dan perempuan lainnya di wilayah tersebut. Dengan adanya perempuan di arena politik, diharapkan aspirasi dan kebutuhan khusus perempuan dapat lebih terwakili dalam perumusan kebijakan. Hal ini menjadi dorongan positif untuk memperkuat peran perempuan dalam merumuskan arah pembangunan Kabupaten Bone, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan semua lapisan masyarakat, dan membangun tatanan sosial yang lebih setara (Hevriansyah, 2021).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali lebih dalam mengenai keterlibatan perempuan dalam politik terutama dalam pemilihan legislatif 2024 ditingkat daerah khususnya di Kabupaten Bone. Keterlibatan perempuan menjadi daya tarik dalam pemilihan legislatif kali ini, bergabungnya perempuan ke dalam politik memperlihatkan “eksistensi” yang secara positif bahwa perempuan dapat pula menjadi perwakilan untuk kemajuan suatu wilayah. Untuk itu diperlukan pemahaman secara mendalam tentang eksistensi perempuan dalam politik local dan dampak dari keikutsertaan perempuan dalam politik lokal. Dengan memahami persepsi ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang berharga untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi perempuan, serta membangun dukungan dan pemahaman masyarakat terhadap kehadiran perempuan dalam kehidupan politik Kabupaten Bone.

### **Tinjauan Pustaka**

Penelitian Terdahulu yang Pertama adalah *Eksistensi Perempuan di Parlemen: Studi Kesetaraan Gender di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya*, Yang di Teliti Oleh Ester Sonya Ulfarita Lapalu, Elizabeth, Pada Jurnal Jurnal: Wacana : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin Pada Desember 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyoroiti kesetaraan gender dan keterwakilan perempuan dalam politik praktis. Selain itu, artikel juga membahas upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan melalui tindakan afirmatif, seperti sistem kuota 30%. Meskipun undang-undang pemilu legislatif telah mengatur kuota 30% perempuan sebagai anggota parlemen di daerah, masih terdapat kendala dalam memenuhi kuota tersebut. Artikel juga menyoroiti kontroversi seputar sistem kuota, di mana beberapa pihak menganggapnya sebagai bentuk diskriminasi.

Selain itu, motif partai politik dalam menggunakan keterwakilan perempuan sebagai strategi kemenangan juga menjadi sorotan dalam penelitian ini. Dengan demikian, kajian literatur yang dapat dihasilkan dari penelitian ini dapat

mencakup topik-topik seperti peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik praktis, implementasi sistem kuota, kontroversi seputar sistem kuota, serta motif partai politik dalam memanfaatkan keterwakilan perempuan. Selain itu, kajian literatur juga dapat membahas peran politik gender dalam memastikan kesetaraan gender dalam proses pembangunan, serta penerapan teori gender sebagai landasan teori dalam membahas kompetensi politik perempuan (Lapalu & Elizabeth, 2021).

Penelitian Terdahulu yang kedua adalah *Tingkat Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019* yang dilakukan oleh Dessy Artina Tahun 2016. penelitian menunjukkan rendahnya partisipasi politik perempuan dan pentingnya penerapan kuota untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Kuota 30% dianggap sebagai jumlah kritis yang dapat membantu perempuan memberikan pengaruh yang berarti dalam politik. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan peningkatan keterwakilan perempuan sesuai dengan kebijakan yang ada, serta adanya tantangan dan kendala dalam implementasi kuota perempuan dalam politik (Artina, 2016).

Keunikan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada tujuannya yang lebih luas. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang fokus pada deskripsi peran perempuan dalam politik, penelitian ini memperluas cakupannya dengan mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap partisipasi perempuan dalam kontestasi pemilihan legislatif 2024. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti peran perempuan dalam arena politik, tetapi juga memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana masyarakat mengartikan dan merespons kehadiran perempuan dalam konteks politik. Dengan merangkul dimensi persepsi masyarakat, penelitian ini berpotensi membuka wawasan baru terkait tantangan dan dukungan yang dihadapi perempuan dalam menciptakan dampak positif di ranah politik. Pendekatan ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual terkait keterlibatan perempuan dalam proses politik legislatif.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menyelidiki peran perempuan dalam politik, khususnya terfokus pada eksistensi calon legislatif perempuan di Kabupaten Bone.

Informan penelitian melibatkan calon anggota legislatif (DPRD) perempuan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kabupaten Bone dan informan lainnya yaitu masyarakat yang ada di Kabupaten Bone. Pendekatan pengumpulan data melibatkan beberapa teknik, seperti wawancara mendalam, observasi langsung dan dokumentasi.

Wawancara mendalam dilakukan untuk memahami motivasi, tantangan, dan pengalaman calon legislatif perempuan dalam terlibat dalam politik. Analisis dokumen bertujuan untuk mendapatkan wawasan tentang visi, misi, dan komitmen mereka yang tergambar dalam program partai dan platform kampanye. Observasi langsung terhadap kegiatan kampanye, pertemuan publik, dan partisipasi calon legislatif perempuan dalam forum-forum politik di Kabupaten Bone memberikan perspektif dinamis.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran holistik tentang eksistensi perempuan dalam politik di Kabupaten Bone, khususnya melalui peran calon legislatif perempuan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang motivasi, tantangan, dan dampak partisipasi perempuan dalam politik lokal, memberikan sumbangan penting bagi pemahaman tentang keterlibatan perempuan dalam konteks pemilihan legislatif.

### **Hasil dan Pembahasan**

Peran perempuan dalam ranah politik memegang peran penting sebagai bagian tak terpisahkan dari dinamika sosial yang melibatkan proses pengambilan keputusan, pembentukan kebijakan, administrasi negara, dan arena politik secara umum (Mardlatillah, 2022). Partisipasi perempuan dalam politik bukan hanya sekadar pengejaran kesetaraan gender, tetapi juga merupakan elemen kunci dalam membentuk lingkungan politik yang lebih inklusif dan mewakili keberagaman masyarakat. Dalam konteks pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik, keterlibatan perempuan membawa kontribusi unik dengan membawa nuansa dan sudut pandang yang beragam, melengkapi proses pengambilan keputusan dengan perspektif yang mungkin terabaikan dalam diskusi yang didominasi oleh satu gender.

## 1. Eksistensi Perempuan dalam Kontestasi Pemilihan Legislatif di Kabupaten Bone

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami eksistensi perempuan dalam kontestasi pemilihan legislatif di Kabupaten Bone, dengan fokus khusus pada wawancara mendalam dengan dua calon legislatif perempuan, yaitu Ibu Suharni dari Partai Nasdem dan Ibu Marliati dari Partai Demokrat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa eksistensi perempuan atau keterlibatan perempuan dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Bone tidak hanya sebagai pelengkap namun menjadikan demokrasi utuh dalam setiap kebijakan yang diambil dan memperhatikan keberpihakan perempuan. Selain itu, kontribusi perempuan dalam politik lokal memiliki dampak positif yang signifikan seperti keterwakilan perempuan yang dapat memperjuangkan kepentingan kebutuhan yang diwakilinya. Melalui keterlibatan perempuan, bukan hanya sebatas pencapaian kesetaraan gender, tetapi juga memperkaya dimensi keberagaman dalam pengambilan keputusan publik, menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan representatif.

Wawancara mendalam dengan Ibu Suharni, calon legislatif dari Partai Nasdem, memaparkan alasan kuatnya untuk tetap maju dalam kontestasi politik. Ia menunjukkan komitmen mendalam terhadap advokasi hak-hak perempuan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan. Dalam wawancara tersebut, Ibu Suharni menekankan pentingnya keberagaman pandangan dan perspektif dalam pembuatan kebijakan. Ia menyuarakan gagasan bahwa kehadiran perempuan dalam arena politik bukan hanya memberikan representasi untuk gender, melainkan juga membawa ciri khas yang diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Di sisi lain, Ibu Marliati, yang merupakan *incumbent*, menyoroti prestasinya dalam membawa perubahan positif selama masa jabatannya. Ia menyatakan niatnya untuk melanjutkan upaya dalam mengatasi tantangan sosial dan ekonomi yang masih dihadapi oleh Kabupaten Bone. Dalam konteks ini, Ibu Marliati membawa pengalaman dan wawasan yang diperolehnya selama menjabat, menegaskan pentingnya kelanjutan dan stabilitas dalam pembangunan masyarakat. Dampak positif dari eksistensi perempuan dalam politik lokal Kabupaten Bone tercermin dalam upaya mereka untuk menciptakan perubahan nyata. Keterlibatan perempuan tidak hanya membawa isu-isu gender ke panggung politik,

tetapi juga merangsang pembahasan mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Eksistensi ini memberikan sumbangan berharga dalam menghadirkan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat.

Hasil penelitian juga menggambarkan bahwa eksistensi perempuan dalam pemilihan legislatif membuka pintu bagi dialog lebih inklusif dan beragam dalam merumuskan kebijakan. Partisipasi perempuan bukan hanya sekadar representasi, tetapi juga memberikan dorongan untuk memperluas pandangan politik. Keberagaman ini merangsang pertukaran ide dan strategi yang lebih kaya, menciptakan kebijakan yang lebih holistik dan akomodatif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Eksistensi perempuan dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Bone tidak hanya tentang mempertahankan kursi politik, tetapi lebih pada tanggung jawab untuk membawa perubahan positif. Dalam konteks ini, keduanya, baik Ibu Suharni maupun Ibu Marliati, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya melihat pemilihan sebagai panggung untuk eksistensi pribadi, tetapi sebagai panggilan untuk memberikan kontribusi nyata pada perubahan dan kemajuan Kabupaten Bone.

Dalam pembahasan bagian ini adalah Penelitian ini menyoroti pentingnya eksistensi perempuan dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Bone, dengan fokus pada dua calon legislatif, Ibu Suharni dan Ibu Marliati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan tidak hanya mencapai kesetaraan gender tetapi juga memperkaya keberagaman dalam pengambilan keputusan publik. Teori pluralisme politik dapat diterapkan untuk menjelaskan bahwa keberagaman perspektif yang dibawa oleh perempuan menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif (Novita et al., n.d.). Dampak positif eksistensi perempuan tercermin dalam upaya mereka untuk membawa isu-isu gender ke panggung politik, merangsang diskusi tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **2. Pemenuhan Kuota 30% Perempuan**

Keterlibatan perempuan dalam hal keterwakilan dalam kepengurusan partai politik dan pada bakal calon harus tetap memperhatikan keterlibatan perempuan 30%. Di Kabupaten Bone sendiri keikutsertaan perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2024 sudah terpenuhi. Artinya banyak perempuan yang sadar akan pentingnya keikutsertaan mereka dalam politik lokal.



Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemenuhan kuota 30% perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Bone, serta menggali pandangan dan pengalaman dua calon legislatif perempuan, Ibu Suharni dari Partai Nasdem dan Ibu Marliati dari Partai Demokrat, terkait kuota tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuota 30% perempuan dalam DPR Kabupaten Bone memiliki dampak positif terhadap peningkatan partisipasi perempuan dalam politik lokal. Melalui analisis data dan wawancara mendalam, terungkap bahwa kuota ini dianggap sebagai peluang signifikan bagi perempuan untuk tetap memiliki akses dan peluang menduduki kursi DPR.

Dalam wawancara dengan Ibu Suharni, calon legislatif dari Partai Nasdem, terungkap bahwa kuota 30% memberikan dorongan yang kuat bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik. Ibu Suharni menyatakan, "Kuota 30% memberikan keyakinan pada perempuan bahwa mereka memiliki tempat yang layak dalam pembentukan kebijakan." Hal ini menunjukkan bahwa kuota bukan hanya sebagai batasan angka, tetapi sebagai pendorong bagi perempuan untuk mengambil peran yang lebih besar dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Demikian pula, wawancara dengan Ibu Marliati dari Partai Demokrat mengungkapkan pandangan positif terhadap kuota tersebut. Ia menyatakan, "Kuota 30% adalah langkah positif untuk mengakhiri ketidaksetaraan gender dalam politik." Ibu Marliati menyoroti pentingnya representasi perempuan dalam pembuatan keputusan politik dan menganggap kuota ini sebagai instrumen strategis untuk mendorong keterlibatan perempuan.

Dalam konteks pemilihan legislatif di Kabupaten Bone, kedua calon perempuan ini menegaskan bahwa kuota 30% bukan hanya tentang memenuhi target angka, tetapi menciptakan landasan untuk perubahan sosial. Kuota ini menciptakan panggung yang lebih setara bagi perempuan, memberikan mereka peluang untuk membawa suara dan aspirasi masyarakat perempuan ke dalam pembahasan kebijakan.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa pemenuhan kuota 30% perempuan dalam DPR Kabupaten Bone mendorong partisipasi perempuan dalam politik lokal. Kuota ini dianggap sebagai mekanisme yang efektif untuk memberikan peluang yang setara dan merata bagi perempuan,

mengatasi ketidaksetaraan gender dalam kebijakan dan pengambilan keputusan. Selain itu, pemahaman dari pandangan dua calon perempuan ini memperkuat argumen bahwa kuota perempuan bukan hanya sebagai aturan, tetapi sebagai inisiatif yang mendukung keadilan dan kesetaraan dalam representasi politik di tingkat lokal.

Dalam Pembahasan Bagian Ini adalah Penelitian ini mengevaluasi pemenuhan kuota 30% perempuan dalam DPR Kabupaten Bone dan melibatkan pandangan dua calon legislatif perempuan, Ibu Suharni dan Ibu Marliati. Hasilnya menunjukkan bahwa kuota tersebut memberikan dorongan signifikan bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik (Widiyaningrum, 2020). Teori partisipasi politik perempuan mendukung temuan ini, menekankan pentingnya kehadiran perempuan dalam pembuatan keputusan politik. Pemahaman dari pandangan kedua calon perempuan ini memperkuat argumen bahwa kuota perempuan bukan hanya sebagai aturan angka, tetapi juga sebagai inisiatif mendukung keadilan dan kesetaraan dalam representasi politik di tingkat lokal (Dewita, 2023).

### **3. Persepsi Masyarakat Terhadap Perempuan dalam Politik**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Bone. Melibatkan wawancara mendalam dengan tujuh responden masyarakat perempuan yang berasal dari Kabupaten Bone yaitu Ibu Rosmini, Ibu Darmawati, Ibu Nurtang, Ibu Kasma, Ibu Sittiha, dan Ibu Hania, Hasil penelitian ini menyoroti berbagai perspektif masyarakat terhadap calon legislatif perempuan di Kabupaten Bone.

Dari hasil wawancara, Ibu Rosmini menyampaikan pandangannya bahwa peran perempuan dalam politik membawa nuansa keberagaman yang diperlukan untuk mengatasi isu-isu spesifik yang dihadapi oleh perempuan. Ia berpendapat bahwa:

*"Kami, perempuan, memiliki kepedulian dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap*

*masalah-masalah seperti pendidikan dan kesehatan.".* (Hasil wawancara dengan Ibu Rosmini, pada tanggal 10 Desember 2023)

Sementara itu, Ibu Darmawati menyoroti urgensi keberagaman dalam wakil-wakil yang terpilih.

*"Penting bagi kami memiliki suara perempuan di DPR untuk memastikan kebutuhan dan*

*aspirasi kami diakomodasi dalam kebijakan yang dibuat."* (Hasil wawancara dengan Ibu Darmawati, 11 Desember 2023)

Sementara itu, Ibu Nurtang menekankan:

*"Karna yang tau itu kebutuhan ibu ibu yah perempuan. Bagaimana harga bahan pokok di pasar dan yang lain. Jadi kalau ada perwakilan perempuan jadi lebih bagus lagi"*. (Hasil wawancara dengan Ibu Nurtang, 11 Desember 2023)

Selain itu, informan lain yaitu Ibu Kasma menjelaskan bahwa,

*"Melihat peran perempuan semakin meningkat memberi saya harapan bahwa ada yang wakiliki di dewan jadi kalau ada keluhan ta mungkin lebih enak mengeluh kalau sama sama ta perempuan"*. (Hasil wawancara dengan Ibu Kasma, 13 Desember 2023)

Lalu, Ibu Sittiha justru pandangannya menekankan pada keterwakilan yang adil:

*"Suara kami harus terdengar, dan melibatkan lebih banyak perempuan dalam politik adalah cara untuk memastikan itu."* (Hasil Wawancara dengan Ibu Sittiha, 13 Desember 2023)

Dalam pandangan Ibu Hania, peran perempuan dalam politik juga berdampak positif pada pemuda:

*"Keterlibatan perempuan menginspirasi generasi muda untuk percaya pada diri mereka sendiri dan berkontribusi pada pembangunan komunitas."* (Hasil wawancara dengan Ibu Hania, 14 Desember 2023)

Hasil penelitian ini mencerminkan keragaman pandangan masyarakat perempuan di Kabupaten Bone terhadap peran perempuan dalam politik. Mereka menyuarakan pentingnya keterwakilan yang adil, keberagaman perspektif, dan peran aktif perempuan dalam membentuk kebijakan yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat. Persepsi ini menjadi suara kritis yang membentuk pandangan masyarakat terhadap peran perempuan dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Bone.

Dalam pembahasan bagian ini adalah penelitian ini menggali persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dalam pemilihan DPR Kabupaten Bone melalui wawancara dengan tujuh responden perempuan. Hasilnya mencerminkan berbagai pandangan, termasuk pentingnya keterwakilan yang adil

dan peran aktif perempuan dalam pembuatan kebijakan (Kedu, 2023). Teori feminisme politik menurut Mary Wollstonecraft mendukung temuan bahwa peran perempuan dalam politik dapat merangsang diskusi tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, eksistensi perempuan dalam pemilihan legislatif membuka pintu bagi dialog lebih inklusif dan beragam dalam merumuskan kebijakan, menciptakan kebijakan yang lebih holistik dan akomodatif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat (Sakir et al., 2021).

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian membuka wawasan terhadap dampak positif yang signifikan dari keterlibatan perempuan dalam dinamika politik lokal, melampaui pencapaian kesetaraan gender semata. Eksistensi perempuan terbukti mampu memperkaya dimensi keberagaman dalam pengambilan keputusan publik, menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan representatif.

Dampak positif eksistensi perempuan dalam politik lokal tergambar dalam usaha mereka untuk menciptakan perubahan nyata. Peran perempuan tidak hanya memasukkan isu-isu gender ke panggung politik, tetapi juga memicu pembahasan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keberagaman dalam partisipasi perempuan merangsang pertukaran ide dan strategi yang lebih kaya, membentuk kebijakan yang lebih holistik dan responsif terhadap beragam kebutuhan masyarakat. Eksistensi perempuan dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Bone, oleh Ibu Suharni dan Ibu Marliati, tidak sekadar tentang mempertahankan kursi politik, melainkan lebih merupakan tanggung jawab untuk membawa perubahan positif dan memberikan kontribusi pada kemajuan Kabupaten Bone.

Penelitian juga menyoroti pemenuhan kuota 30% perempuan dalam DPR Kabupaten Bone sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik lokal. Kuota ini bukan hanya sekadar aturan angka, melainkan menjadi pendorong bagi perempuan untuk mengambil peran yang lebih besar dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, kuota 30% menjadi landasan bagi perubahan sosial yang merata, memberikan panggung yang setara bagi perempuan untuk membawa suara dan aspirasi masyarakat perempuan ke dalam pembahasan

kebijakan.

Persepsi masyarakat mencerminkan beragam pandangan terhadap peran perempuan dalam politik. Dari kebutuhan khusus perempuan hingga urgensi keterwakilan yang adil, hasil penelitian ini menegaskan bahwa persepsi masyarakat merupakan faktor kritis dalam membentuk pandangan terhadap eksistensi perempuan dalam pemilihan legislatif. Kesimpulannya, eksistensi perempuan, sebagaimana tercermin dalam penelitian ini, membuka jalan bagi dialog inklusif dan beragam, menciptakan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bone.

### Referensi

- Amaliah, Y., & Sakir, A. R. (2023). *Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Kantor Camat Lamuru Kabupaten Bone*. 1(3).
- Artina, D. (2016). Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), 123–141. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art7>
- Asriati, M., Lubis, L. A., & Ginting, R. (2022). Strategi Komunikasi Politik Calon Legislator Perempuan pada Kampanye Pemilihan Legislatif 2019 di Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. *Komunika*, 18(2), 36–45.
- Bukido, R. (n.d.). *URGENSI PEREMPUAN DALAM MENGAWASI GERAK-GERIK PEMILU*.
- Dewita, L. (2023). *Analisis keterwakilan politik perempuan di DPRD Kabupaten Tasikmalaya: Studi kasus keterwakilan perempuan pada partai PDIP DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode 2019-2024*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hevriansyah, A. (2021). Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(1), 67–85.
- Kedu, L. D. M. G. (2023). *STRATEGI PARTAI POLITIK UNTUK MENINGKATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA PEMILU TAHUN 2024*. IPDN.

- Lapalu, E. S. U., & Elizabeth. (2021). Eksistensi Perempuan di Parlemen Studi Kesetaraan Gender di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 08(02), 306–320. <https://ejournal.upr.ac.id/index.php/Jwcn/article/view/3658%0Ahttps://ejournal.upr.ac.id/index.php/Jwcn/article/download/3658/2819>
- Mardlatillah, S. D. (2022). PEREMPUAN DAN POLITIK: PERAN PEREMPUAN DALAM DUNIA POLITIK PERIODE 2009-2019. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 4(2), 161–167.
- Mayrudin, Y. M., Nurrohman, B., & Astuti, D. S. (2022). Eksistensi Politik Kader Perempuan pada Pengorganisasian Partai-partai Politik. *Ijd-Demos*, 4(3), 1071–1090.
- Novita, I., Adnan, F., & Handoko, T. (n.d.). Eksistensi Komisioner Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender pada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17(30), 117–127.
- Puspitasari, D. M., & Adnan, M. (2020). *PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLITIK MASA SIDANG 2019-2020/42/PEM/2020*. Faculty of Social and Political Science.
- Ronsumbre, N., Deliarnoor, N. A., & Mulyawan, R. (2020). Eksistensi dan Kinerja Legislatif dari Unsur Perwakilan Wilayah Adat Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif di Papua. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 188–202.
- Sakir, A. R., Yunus, R., & Syamsu, S. (2021). Budaya Birokrasi: Kinerja Pegawai Samsat Maros Dalam Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Sosio Sains*, 7(1), 25–35.
- Ummaya, A. B., Saparija, N. A., & Nisfiani, S. (2022). Keterwakilan Politik dan Partisipasi Perempuan Pasca Reformasi di Era Pemerintahan Megawati dan Joko Widodo. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 3(2), 187–198.
- Widiyaningrum, W. Y. (2020). Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis. *JISIPOL/ Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 126–142.